



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko

Utang Negara sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan

PALU, 14 Agustus 2018



OUTLINE

1

**Perkembangan
Pengelolaan Utang
Negara**

2

**Sekilas tentang SUKUK
Negara**

3

Saving Bond Ritel 004



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

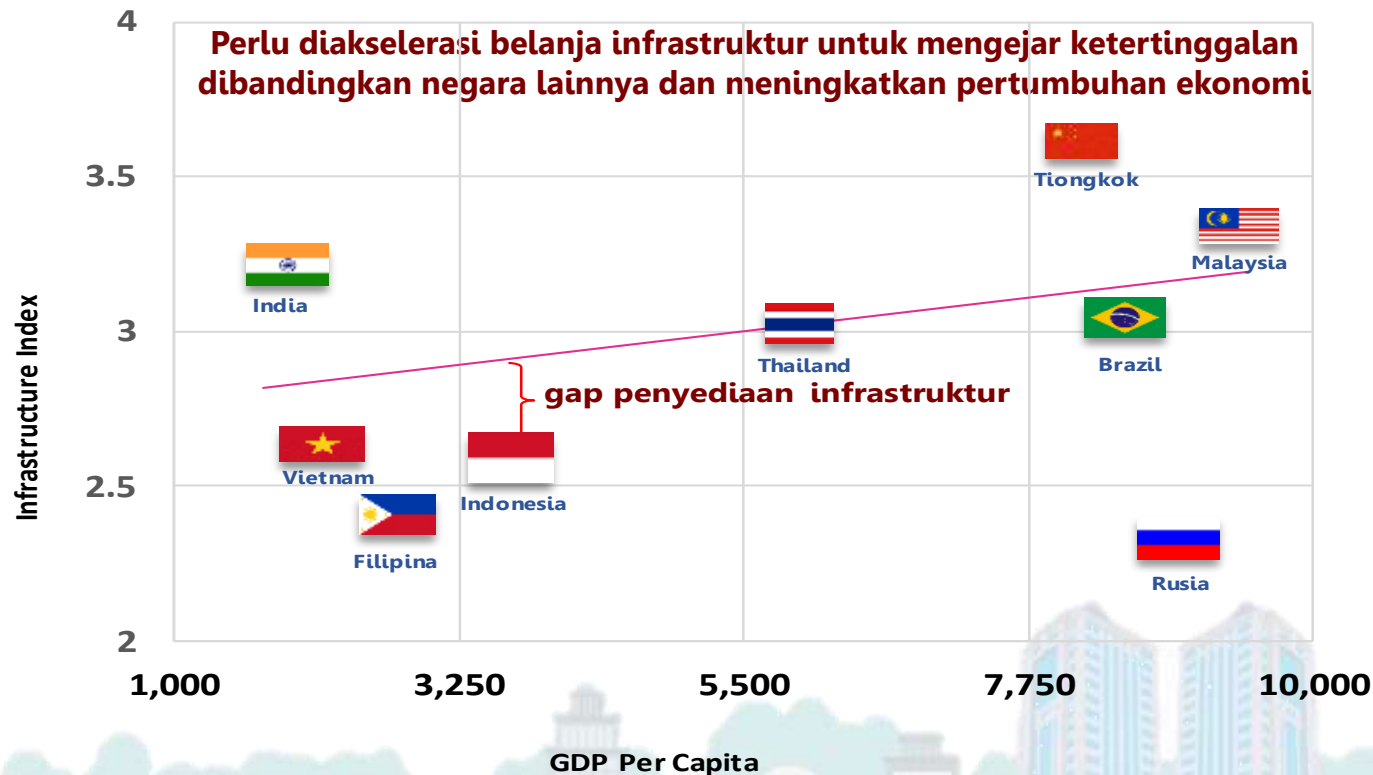
1

Perkembangan Pengelolaan Utang Negara

Tantangan Pembangunan

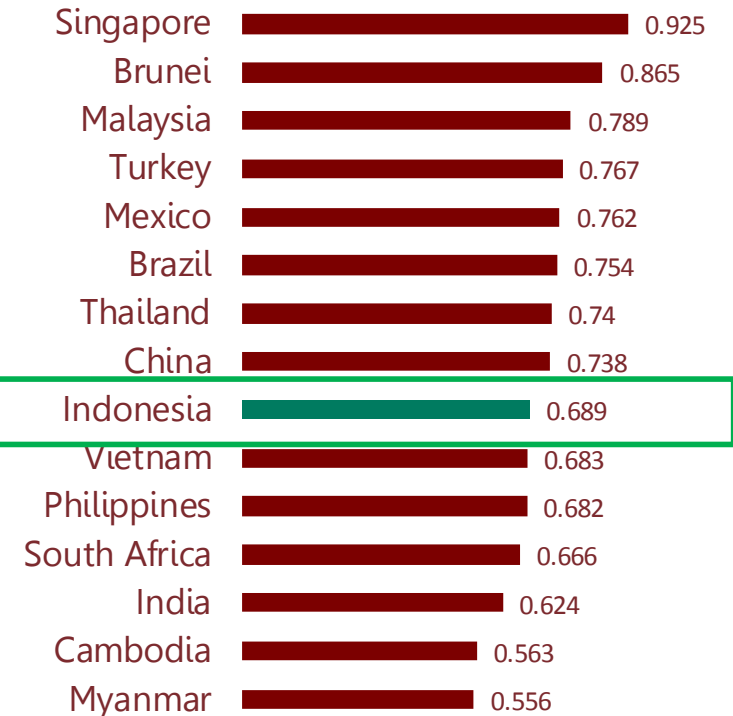
...penyediaan infrastuktur dan kualitas SDM Indonesia masih tertinggal...

Kondisi indeks infrastruktur beberapa negara dan GDP per kapitanya



Data tahun 2016, sumber: World Bank

Human Development Index 2017



sumber : UNDP

Perlu peningkatan belanja kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

MENGAPA PERLU BERUTANG?

...filosofi pembiayaan pembangunan melalui utang...

Menjaga momentum & menghindari *Opportunity Loss*

- Belanja prioritas (infrastruktur & SDM) tidak bisa ditunda;
investasi SDM fasilitas kesehatan dan pendidikan
- Penundaan belanja mengakibatkan biaya lebih besar di masa datang

Menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi

- Dalam kondisi perekonomian melamban, stimulus fiskal melalui utang dapat mendorong pertumbuhan.
- Pertumbuhan mendorong peningkatan penerimaan pajak di masa depan untuk membayar kembali utang

Mengembangkan pasar keuangan

- Menyediakan *benchmark* bagi industri keuangan
- Menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat
- Sebagai instrumen operasi moneter

Melibatkan peran serta generasi berikutnya dalam berinvestasi yang memberi manfaat jangka panjang (*sharing the burden*)

- Utang untuk investasi sebagai pemerataan tanggung jawab antar generasi dalam penyediaan aset

Utang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi yang penting dan mendesak

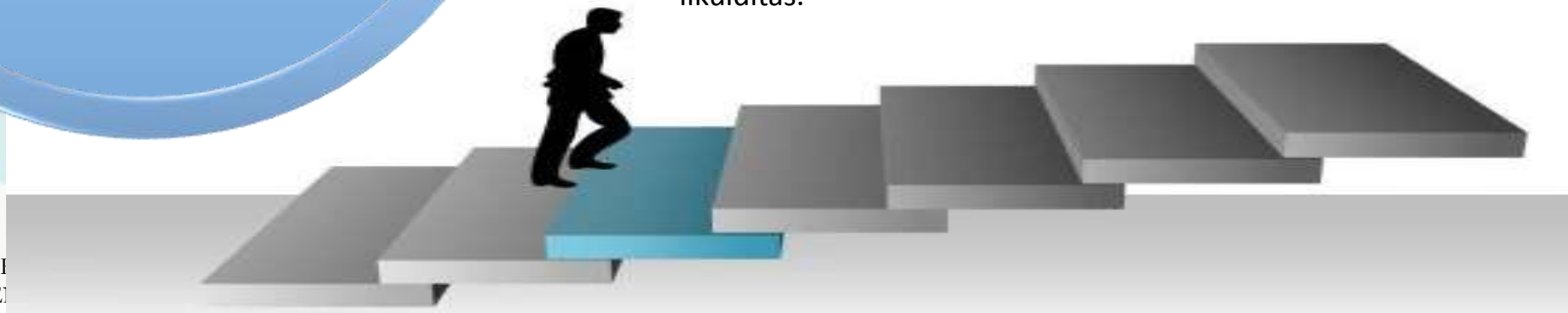
Tujuan dan Kebijakan Umum

Tujuan

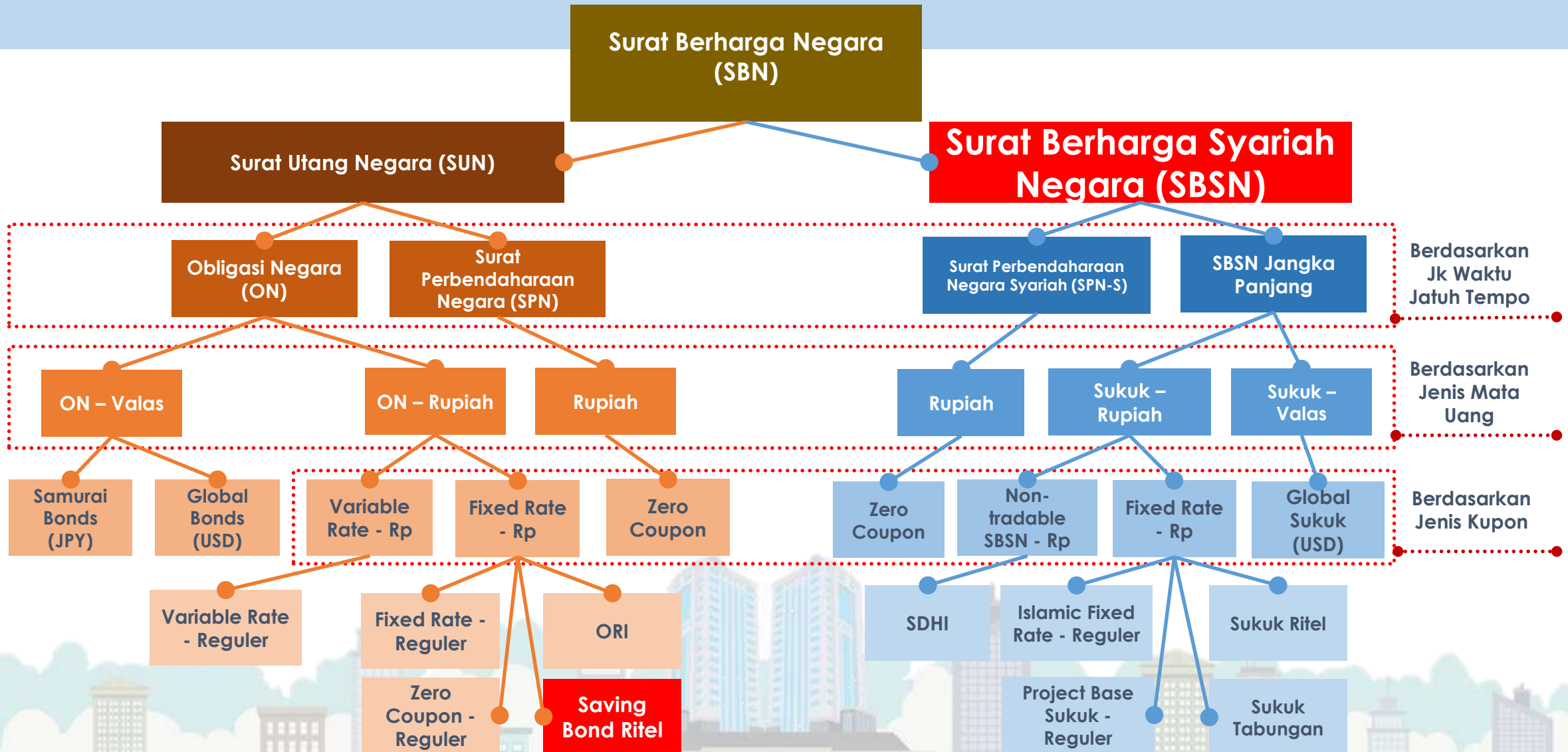


Kebijakan Umum

- Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman.
- Meningkatkan optimalisasi biaya utang untuk mendukung kesinambungan fiskal.
- Mengoptimalkan pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap.
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat.
- Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
- Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas.
- Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.
- Mengoptimalkan pinjaman tunai untuk meningkatkan fleksibilitas pemenuhan pembiayaan
- Meningkatkan fungsi hubungan investor dan kelembagaan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di SBN melalui pengembangan jalur distribusi SBN Ritel secara *online*.

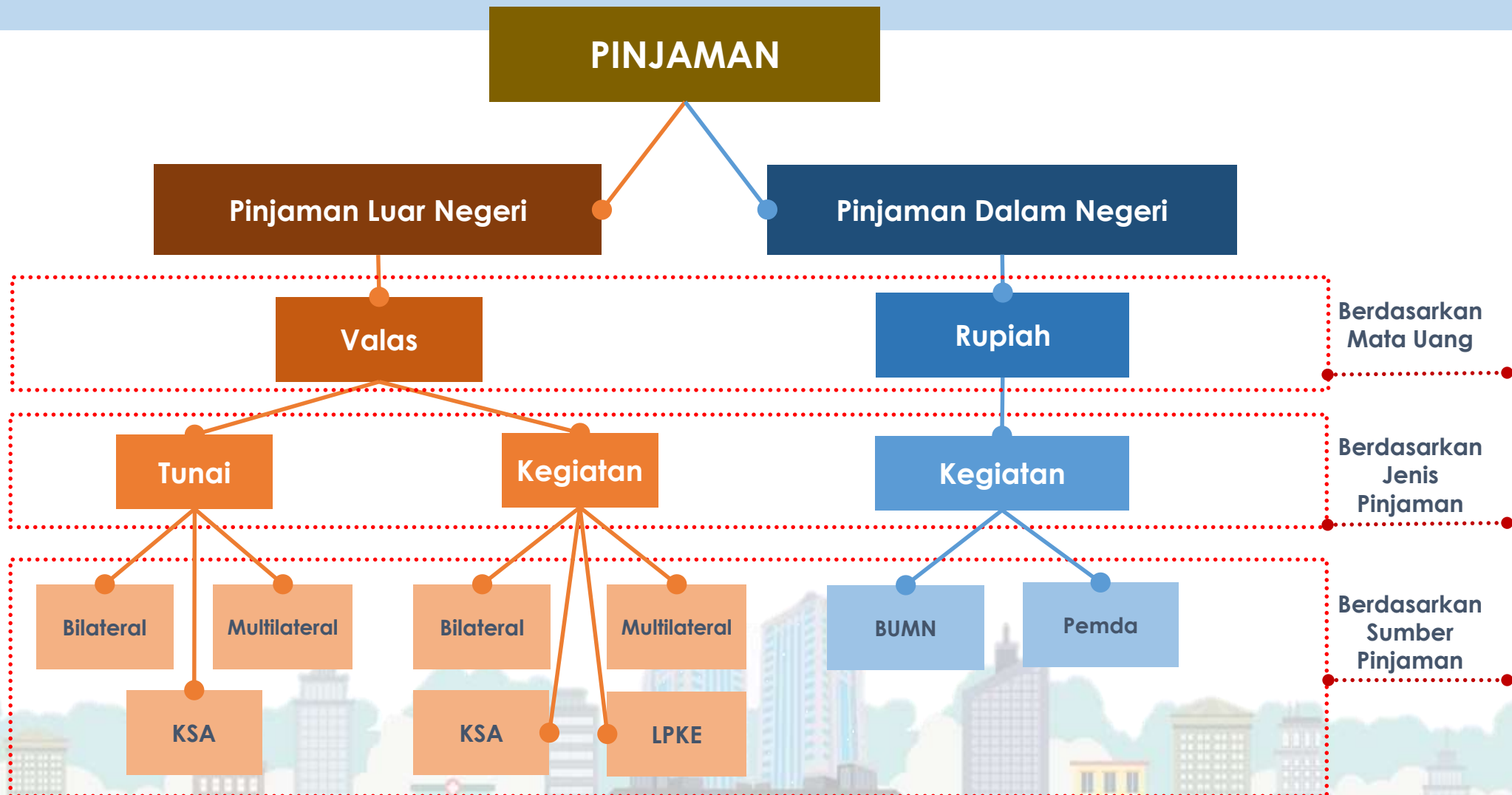


Instrumen Utang: SBN

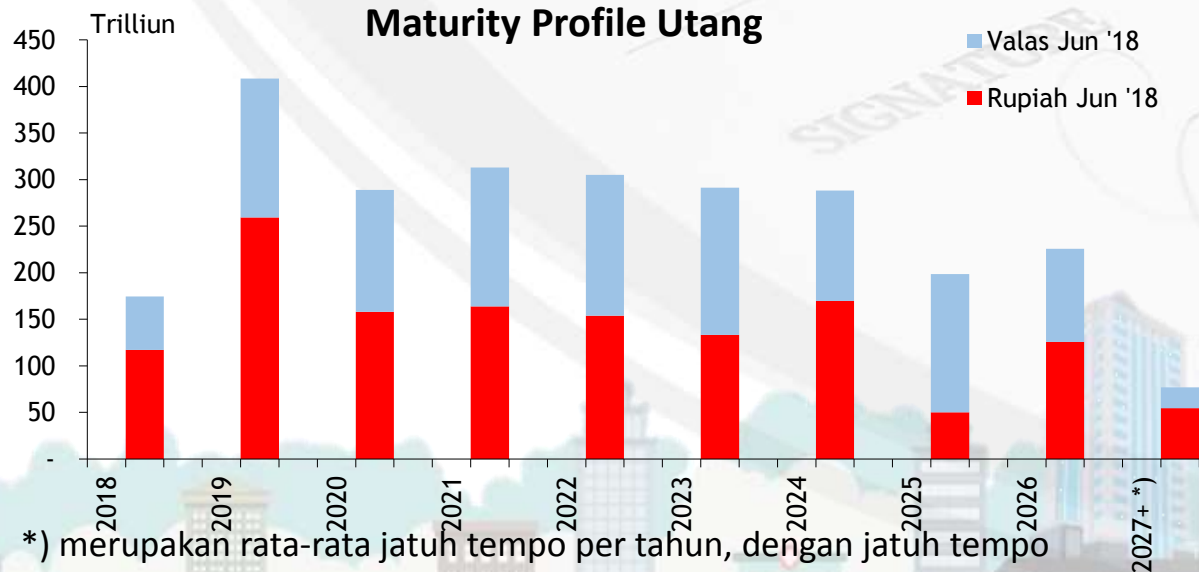
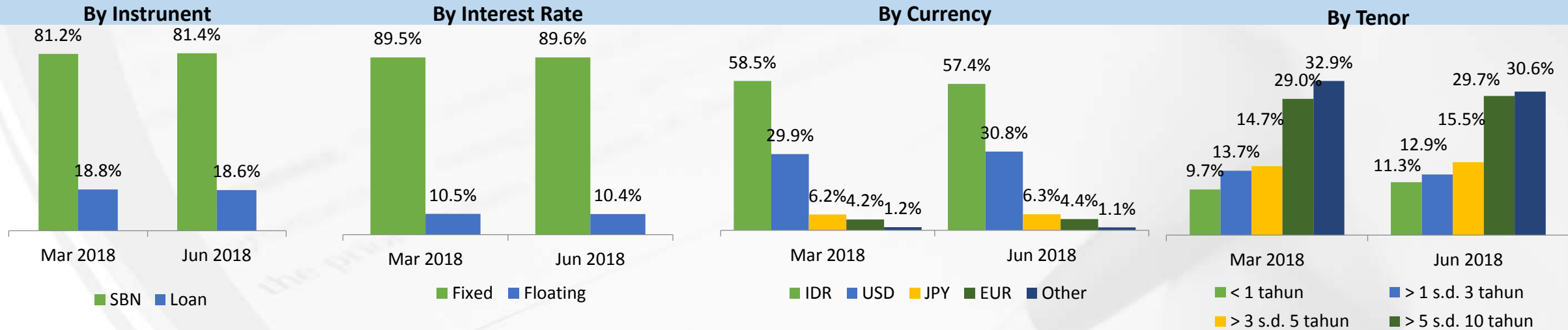


Catatan:
FR - Reguler : semi annual coupon
VR - Reguler : quarterly coupon
ORI : monthly coupon

Instrumen Utang: Pinjaman



Komposisi Utang Negara 30 Juni 2018



*) merupakan rata-rata jatuh tempo per tahun, dengan jatuh tempo terpanjang tahun 2055

- Outstanding utang bulan Maret 2018 sebesar Rp4.136,4 triliun menjadi Rp4.227,7 triliun pada akhir juni 2018
- Pemerintah pemerintah telah melakukan pengadaan utang sesuai dengan strategi antara lain:
 - Mengutamakan tingkat bunga tetap
 - Mengutamakan utang denominasi Rupiah
 - *Shortening duration* untuk meningkatkan efisiensi biaya utang
- Dilihat dari *maturity profile* utang pemerintah dapat dilihat bahwa jatuh tempo utang tertinggi akan terjadi pada tahun 2019 hingga Rp400 triliun dan selanjutnya berada pada kisaran Rp250 triliun.

Mengelola *Trade-off* antara Risiko dan Biaya Utang

RISIKO

adanya ketidakpastian yang berpotensi menyebabkan terjadinya suatu peristiwa.

Indikator:

- **Risiko perubahan tingkat bunga**
 - *Variable rate*
 - *Refixing rate*
- **Risiko perubahan nilai tukar**
 - Rasio utang valas
- **Risiko pembiayaan kembali**
 - Rata-rata waktu jatuh tempo
 - Duration
 - Jatuh tempo dalam 3 tahun

Faktor yang Mempengaruhi:

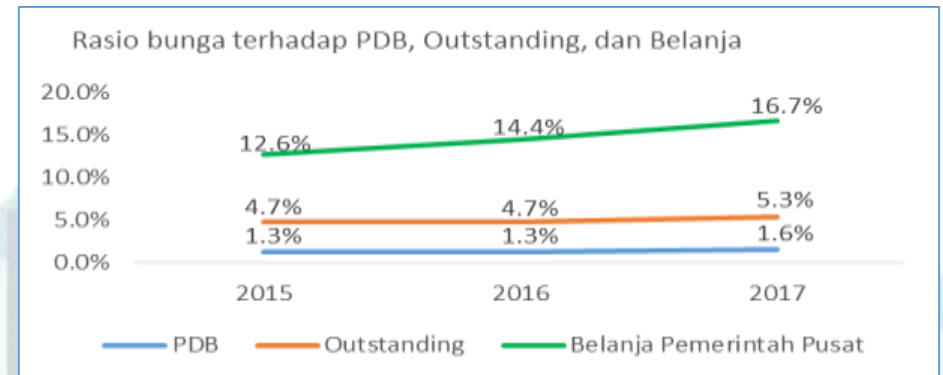
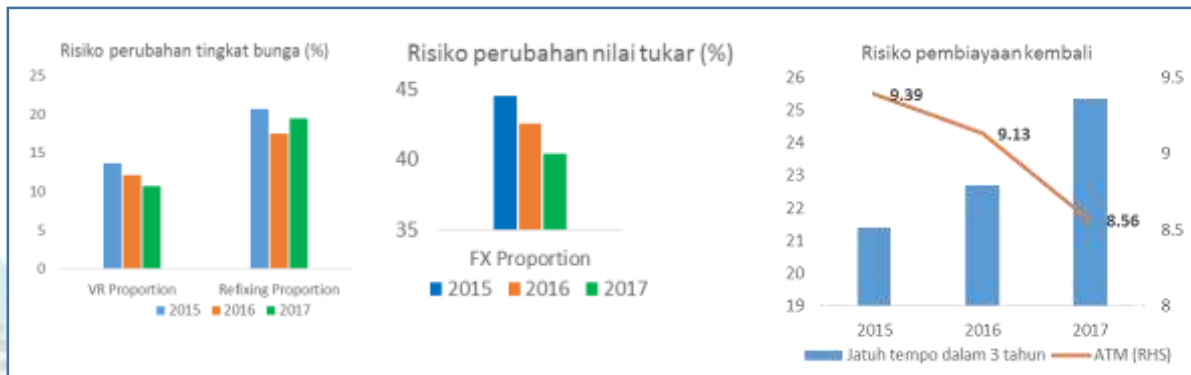
- Perubahan Asumsi Ekonomi Makro
- Perubahan Kondisi Pasar Keuangan
- Kebutuhan Pembiayaan dan Kebijakan Utang
- Penyerapan Pinjaman oleh Kementerian/Lembaga

BIAYA

Tingkat imbal hasil yang diberikan kepada investor atau kreditur, antara lain: *Management Fee/Up front fee* Pinjaman, *Kupon/Bunga/Margin*, *Fee Agen Penjual*, *Diskon Obligasi*, *Commitment Fee* Pinjaman

Indikator:

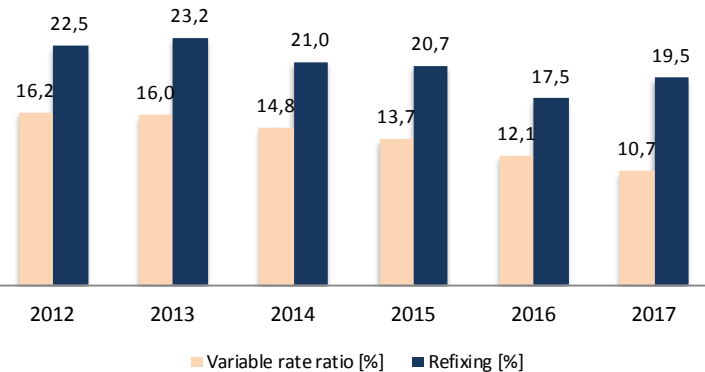
- **Rasio pembayaran bunga terhadap *outstanding*.**
- **Rasio pembayaran bunga terhadap PDB**
- **Rasio pembayaran bunga terhadap belanja**



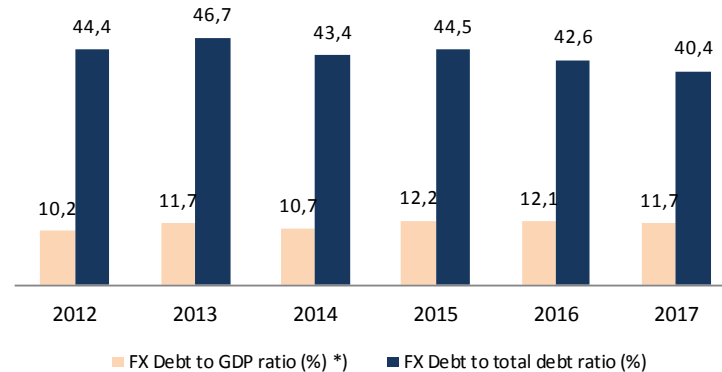
Utang Dikelola Dengan Baik

...*Outstanding* utang meningkat, risiko utang semakin terkendali..

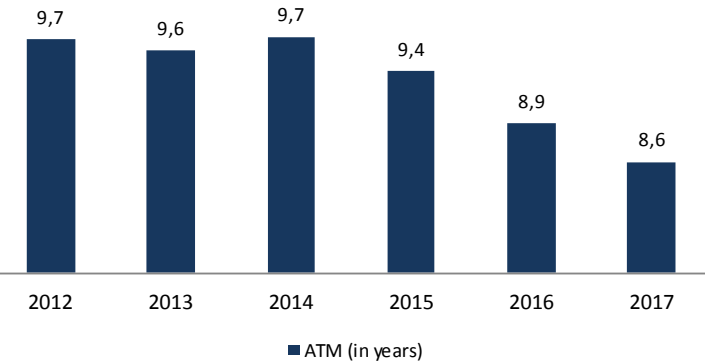
Interest Rate Risk



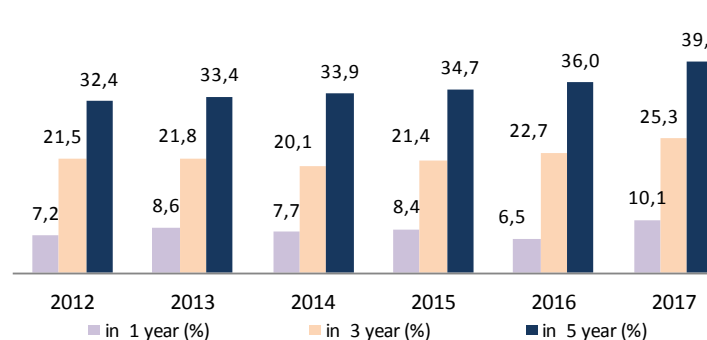
Exchange Rate Risk



Average Time To Maturity



Debt Maturity



- Tingkat bunga *variable/floating* dan ATM semakin menurun
- Porsi utang dalam valas dapat dikendalikan dalam kisaran 10%-12% terhadap PDB
- Jatuh tempo utang dapat dikendalikan dengan mempertimbangkan jatuh tempo utang dalam 1, 3, dan 5 tahun agar tidak membebani fiskal.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

Sekilas Tentang SUKUK Negara

Pembiayaan Infrastruktur

...Penyediaan infrastruktur oleh pemerintah hanya sebesar 41% dari total kebutuhan 5 tahun...

Kebutuhan Infrastruktur (2015 – 2019)		Rencana Sumber Pembiayaan	
Sektor	Rp Tn		
Jalan	733,0	APBN + APBD Rp1.978,6 T  Realisasi & Alokasi: • 2015: Rp256,3 T • 2016: Rp317,1 T • 2017: Rp387,3 T Gap hingga 2019 Rp1.017,9 T	
Kereta Api	226,0		
Penerbangan	144,0		
Transportasi Laut	591,2		
Sumber Daya Air	450,9		
Perumahan	327,5	BUMN Rp1.066,2 T  Antara lain didukung oleh pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah	
Transportasi Perkotaan	86,0		
Transportasi Darat (ASDP)	47,0		
Kelistrikan	1.000,0		
Energi	507,3		
Air Bersih & Pengolahan Limbah	403,0	SWASTA Rp1.751,5 T  Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Beberapa fasilitas yang tersedia <i>Viability Gap Fund (VGF), Project Development Fund (PDF), Availability Payment (AP), dan Penjaminan</i>	
Komunikasi & TI	280,3		
TOTAL	4.796,2		

- Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur adalah melalui utang dalam bentuk SBSN dan pinjaman
- Diperlukan kebijakan peran BUMN/D dan swasta untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur
- Kebijakan ini merupakan salah satu solusi dimana kapasitas fiskal pemerintah yang semakin terbatas

Sumber: Kemenkeu, 2017



Sumber Pendanaan Pembangunan Nasional



Berbagai proyek infrastruktur lainnya di Indonesia, banyak yang dibiayai melalui
SUKUK NEGARA



Pembangunan **Jalan dan Jembatan** di **30 Provinsi**



Pembangunan **Jalur Kereta Api** di Jawa, Sumatera, **Sulawesi**



Pembangunan **328 Proyek Sumber Daya Air**
(bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah)



Pengembangan & Revitalisasi **Asrama Haji** di **24 Lokasi**



Pembangunan & Pengembangan **Gedung Perkuliahan** di **54 Perguruan Tinggi**



Pembangunan & Pengembangan **32 Madrasah**



Pembangunan & Rehabilitasi **701 Kantor Urusan Agama & Manasik Haji**

Pembangunan **3 Taman Nasional**
(Baluran, Gunung Gede Pangrango, Aketajawe-Lolobata/Halmahera)



Pembangunan & Pengembangan **3 Laboratorium**



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO



Beberapa Proyek di Sulawesi yang dibiayai oleh SUKUK Negara



IAIN PALU

"Pembangunan enam gedung yang dibiayai dengan SBSN telah selesai dilaksanakan dan akan segera dimanfaatkan"

Prof. Dr. H. Zainal Abidin M.Ag, Antara Sulteng, 10 Ags 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Pembangunan Asrama
Haji Sudiang, Makassar
Sumber dana dari SBSN



Menteri Agama Resmikan
Gedung Dosen (SBSN) dan
Gedung FEBI UIN Alauddin,
UIN Online, 15 Februari 2018

Definisi

**SUKUK
NEGARA
adalah**



Surat Berharga Negara



Diterbitkan Berdasarkan Prinsip Syariah



Bukti atas Bagian Penyertaan thd Aset SBSN



Dalam Mata Uang Rupiah atau Valuta Asing



Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara



Tujuan

- Pembiayaan APBN
- Pembiayaan pembangunan proyek



Perbedaan Sukuk dan Obligasi

Sukuk

Obligasi

Deskripsi	Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, merepresentasikan kepemilikan investor atas <i>underlying asset</i> .	Surat berharga berupa pernyataan utang dari penerbit kepada investor.
Akad	Menggunakan akad syariah untuk menghasilkan kewajiban finansial antara issuer dengan investor	Perjanjian utang piutang.
<i>Underlying asset</i>	Memerlukan <i>underlying asset</i> sebagai dasar penerbitan dan sumber pembayaran imbalan.	Tidak perlu.
Landasan syariah	Perlu landasan syariah berupa fatwa dan/atau opini syariah.	Tidak perlu.
Penggunaan dana hasil penerbitan	Untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Tidak ada.
Return/ Imbalan	<i>Return</i> terkait dengan aset, akad dan tujuan pendanaannya.	Berupa bunga.
Basis investor	Investor konvensional dan investor syariah.	Investor konvensional.

PEMBIAYAAN NEGARA DENGAN SKEMA SYARIAH (SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA / SUKUK NEGARA)

Sejak tahun 2008, Pemerintah telah berupaya mendorong perkembangan keuangan syariah melalui penerbitan **SBSN**.

Selama satu dekade, SBSN telah menjadi instrumen pembiayaan dan investasi syariah yang penting, serta turut berperan langsung dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.

Menyediakan alternatif sumber pembiayaan APBN dan Pembiayaan Proyek



Menyediakan instrumen investasi dan likuiditas berbasis syariah



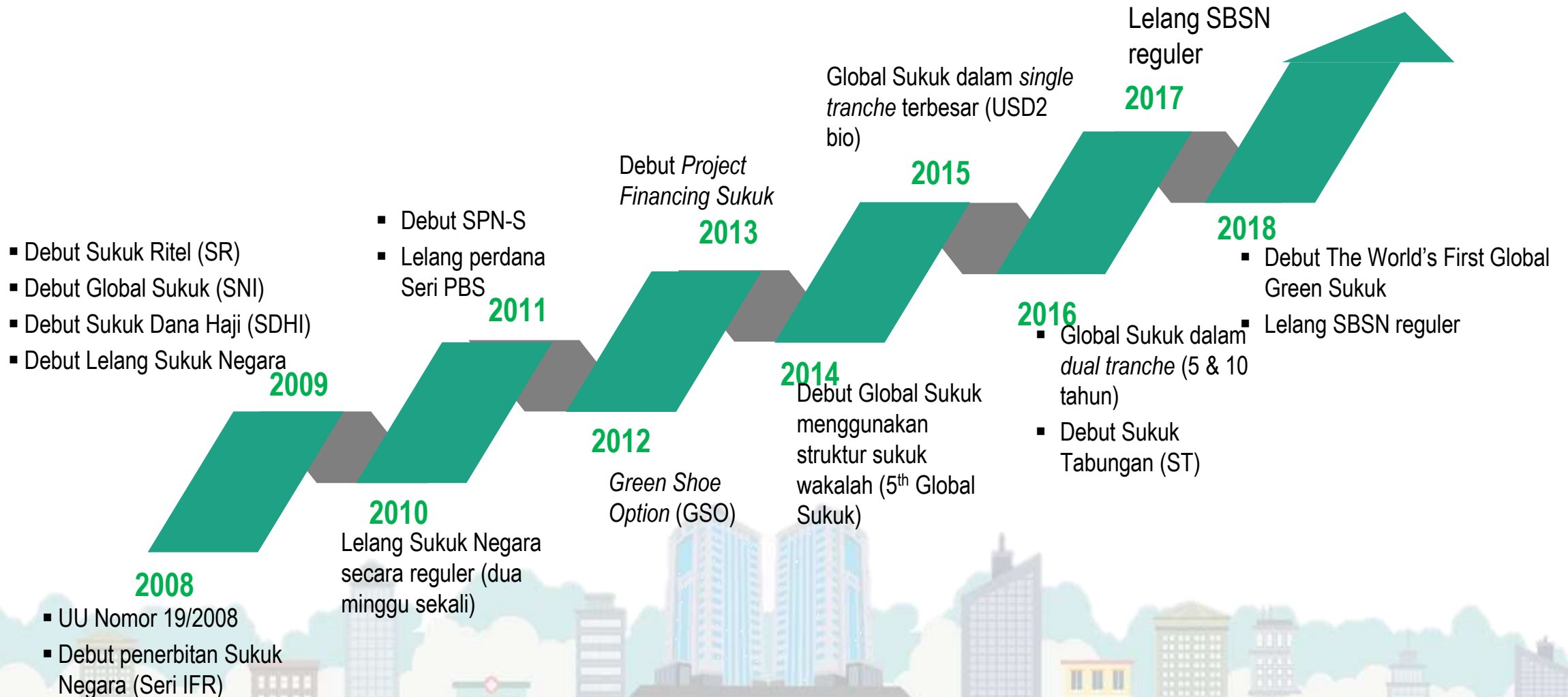
Mengembangkan pasar keuangan syariah



Menyediakan *benchmark* bagi penerbitan sukuk korporasi



Selama satu dekade, peran SUKUK NEGARA sebagai instrumen pembiayaan dan investasi syariah semakin signifikan.



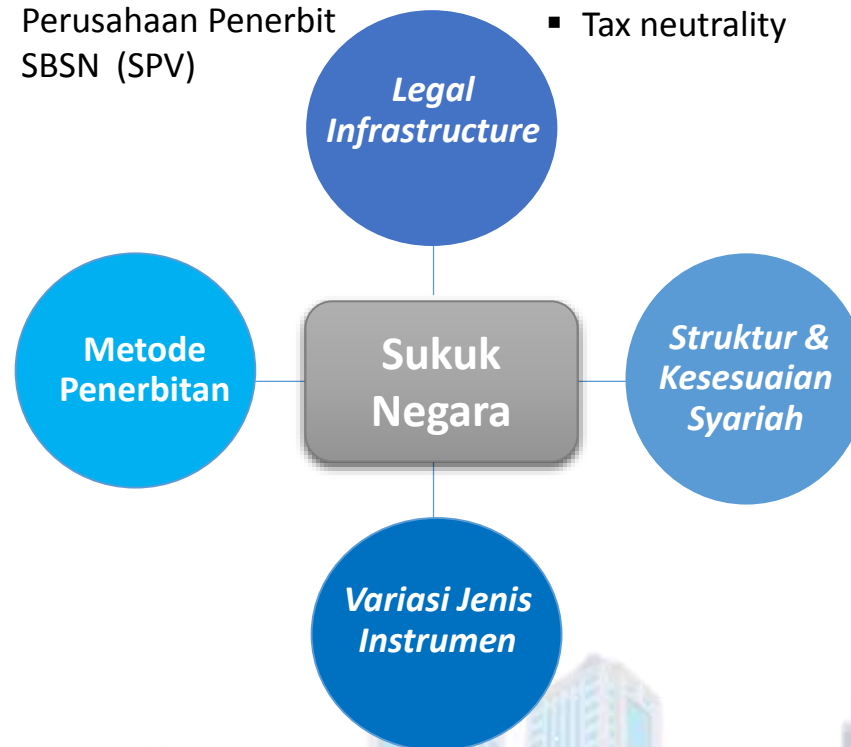
Faktor Pendukung Sukuk Negara

Legal infrastructure yang memadai:

- UU Nomor 19/2008
- Perusahaan Penerbit SBSN (SPV)
- *Underlying assets*
- Tax neutrality

3 metode penerbitan Sukuk Negara:

- Lelang
- Bookbuilding
- Private placement



Fatwa/Opini Syariah DSN MUI & Struktur Sukuk:

- **6 Fatwa** terkait Sukuk Negara
- Opini Syariah untuk tiap penerbitan Sukuk Negara
- **4 struktur sukuk :**
 - Ijarah Sale and Lease Back
 - Ijarah Asset to be Leased
 - Ijarah Al Khadamat
 - Wakalah

7 jenis instrumen Sukuk Negara:

- Islamic Fixed Rate (IFR)
- Project Based Sukuk (PBS)
- Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)
- Sukuk Negara Indonesia (SNI) / Global Sukuk
- Surat Perbendaharaan Negara – Syariah (SPN-S)
- Sukuk Negara Ritel (SR)
- Sukuk Tabungan (ST)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3

Saving Bond Ritel (SBR004)

Jadwal Penerbitan SBR004



Bank



Perusahaan
Efek



Perusahaan Fintech
*Peer-to-Peer
Lending*



Perusahaan Efek
Khusus



Daftar *Call Center* Mitra Distribusi dengan Layanan *Online*

PT Bank Central Asia, Tbk	Telp: 62 21 2358 8000 / 1500888 (Halo BCA) Website: https://ibank.klikbca.com/
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Telp: 14000 (Mandiri Call) Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Telp: 1500046 (BNI Call) Website: : http://www.bni.co.id
PT Bank Permata, Tbk	Telp: 1500111 Website: https://new.permatanet.com
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Telp: 62 21 575 2510 / 14017/ 1500017 (Call BRI) Website: https://sbn.bri.co.id
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Telp: 021-1500286 Website: https://btn.co.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk	Telp: 62 21 2924 9088/9129 62 21 2924 9125/9135 Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/
PT Bareksa Portal Investasi	Telp: 62812 2345 4552 Website: http://sbn.bareksa.com/
PT Star Mercato Capitale (Tanamduit)	Telp: 62 21 726 8735 Website: support@tanamduit.com
PT Investree Radhika Jaya	Telp: 62 21 2978 4888 Website: https://sbn.investree.id
PT Mitrausaha Indonesia Group (Modalku)	Telp: 021-2258 5350 Website: https://modalku.co.id

Bagaimana cara membeli SBR004?

REGISTRASI



1. Calon investor melakukan registrasi melalui Sistem Elektronik MiDis
2. Membuat SID (*Single Investor Identification*) dan Rekening surat berharga via *Sistem Pemesanan Online* (bagi yang belum memiliki)



PEMESANAN



3. Calon investor melakukan pemesanan melalui Sistem Elektronik MiDis setelah membaca ketentuan dalam memo info
4. *Verified order* akan mendapatkan kode pembayaran (*Billing Code*) via Sistem Elektronik MiDis atau email
5. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana sesuai pemesanan



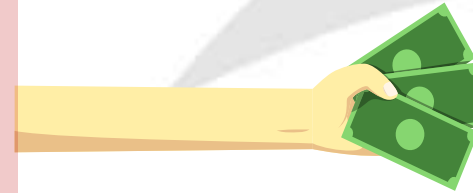
KONFIRMASI



8. Menerima bukti konfirmasi kepemilikan SBN ritel via Sistem Elektronik MiDis dan email yang terdaftar



PEMBAYARAN



6. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi dengan berbagai saluran pembayaran (*teller, ATM, internet banking, mobile banking*) dengan batas waktu yang telah ditentukan
7. Calon investor memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) & notifikasi *completed order* via Sistem Elektronik MiDis dan email yang terdaftar



Terima Kasih

Data dan informasi terkait utang dapat diakses melalui



<http://www.djppr.kemenkeu.go.id>



iru.djppr@kemenkeu.go.id



@DJPPRkemenkeu



DJPPRKemenkeu



DJPPRKemenkeu



@djpprkemenkeu



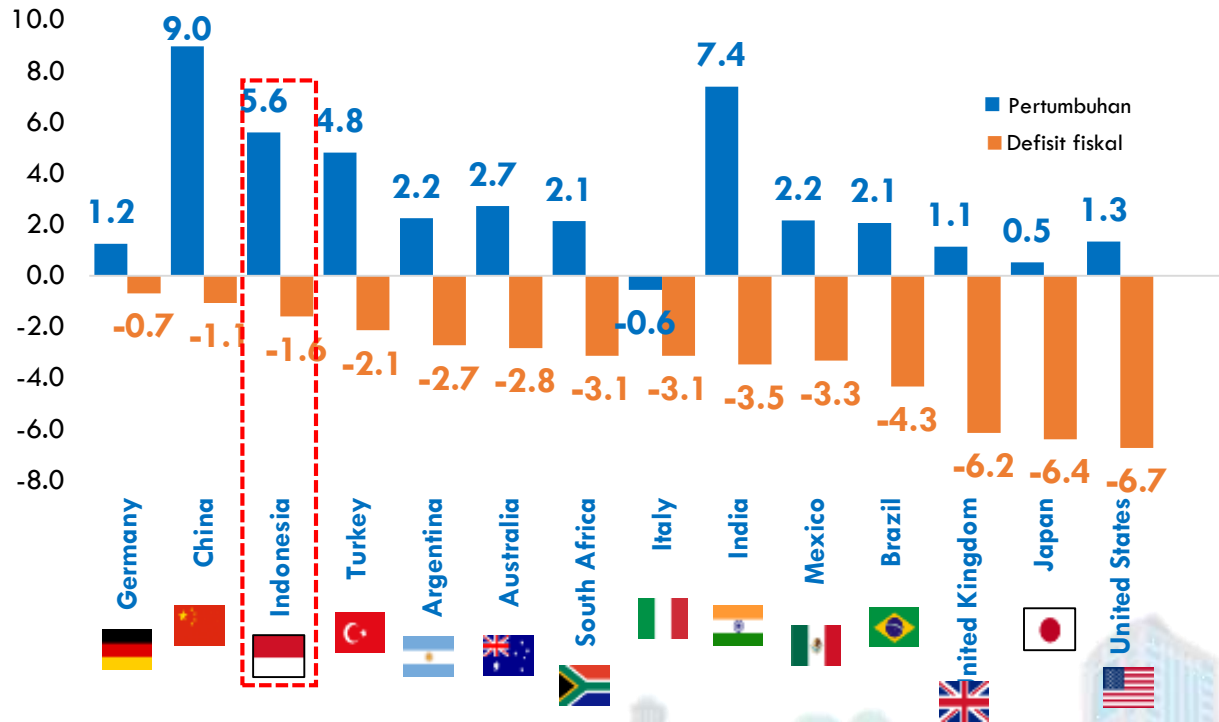
**Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

**Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1
Jakarta Pusat 10710 T. (021) 3459616**

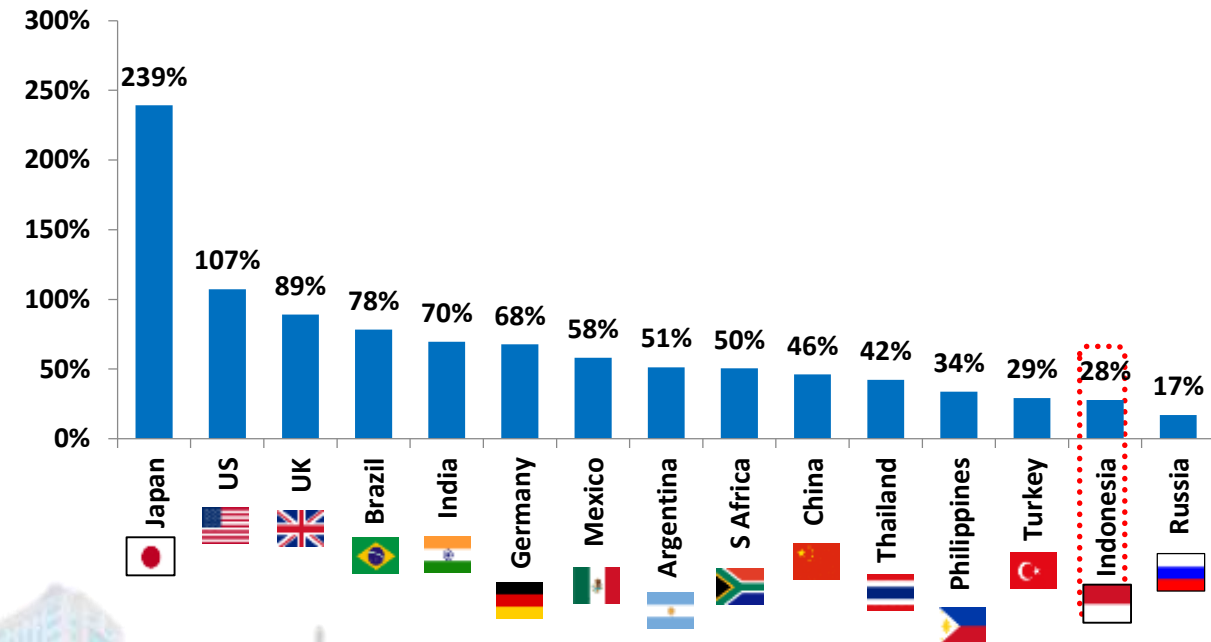
Bagaimana Defisit, Pertumbuhan, dan level utang di berbagai negara?

...Defisit dan rasio utang Pemerintah rendah, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi

Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir



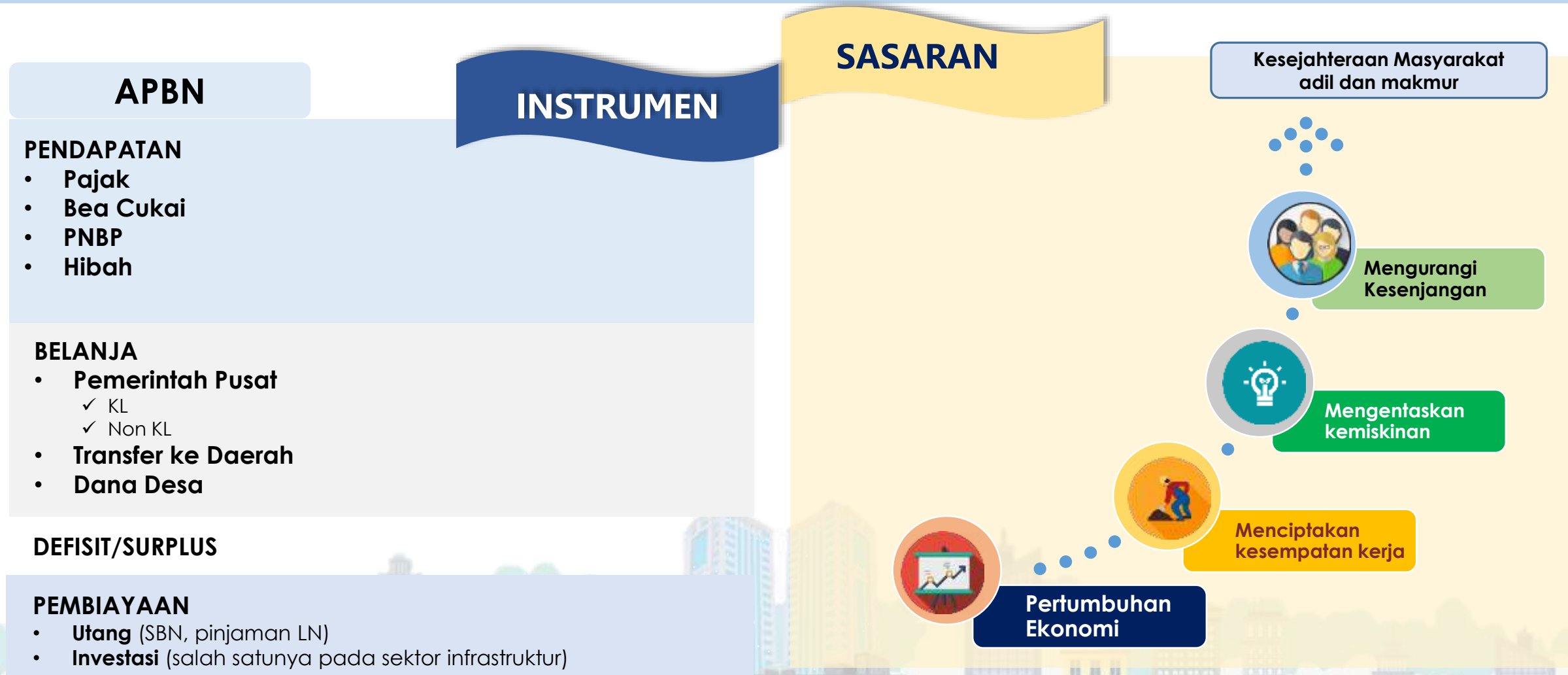
Rasio Utang terhadap PDB, 2016



Sumber: World Economic Outlook - IMF April 2017, CEIC, Kemenkeu diolah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

...sebagai instrumen untuk menciptakan pertumbuhan, kesejahteraan & pemerataan...



PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROYEK KPBU



PPP Project Identification and Priorities

Programs and activities proposal for supporting implementation and sustainability of PPP Project

Approval Programs and activities budget for supporting implementation and sustainability of PPP Project

Availability Payment



Konsesi Dengan Dukungan Pemerintah



Konsesi Tanpa Dukungan Pemerintah

